

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rekrutmen politik dalam tubuh partai disadari memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas organisasi kepartaian, dan pada dasarnya rekrutmen politik yang dijalankan oleh partai lebih dominan dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan ketersediaan kader untuk diusulkan menjadi kandidat politik. Semakin banyak peminat dalam seleksi rekrutmen politik akan menentukan pola seleksi yang lebih ketat dan semakin rendah partisipasi kandidat dalam mengikuti seleksi rekrutmen politik akan mengakibatkan pola seleksi yang cenderung lebih longgar. Dari hasil analisa yang penulis lakukan mengenai pola rekrutmen politik antara Partai PPP dan NasDem dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Proses Rekrutmen

Proses rekrutmen politik yang dijalankan oleh Partai PPP dan NasDem tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dalam tahapan pelaksanaannya, kedua partai tersebut sama-sama menerapkan seleksi tiga tahap yang meliputi tahap sertifikasi yaitu tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi dan berbagai hal yang mempengaruhi sertifikasi meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai, dan norma norma sosial informal. Tahap kedua yaitu tahap penominasian meliputi ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari

penyeleksi ketika memutuskan siapa kandidat yang dinominasikan. Tahap ketiga adalah pemilu yaitu tahap terakhir yang memutuskan siapa yang lolos dalam rekrutmen politik yang ditentukan lewat kemenangannya dalam pemilu.

2. Penominasian Kandidat.

Mengenai siapa kandidat yang berhak mengikuti seleksi antara Partai PPP dan NasDem sama-sama menggunakan pola inklusif dengan berbagai persyaratan tambahan yang diajukan partai dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk mengikuti proses seleksi yang diadakan kedua partai namun perbedaan yang ada disini lebih dominan terletak pada kualifikasi kandidat yang akan mendaftarkan diri, untuk Partai PPP pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk mengikuti proses seleksi namun disini lebih spesifik Partai PPP mensyaratkan setiap kandidat yang akan mendaftar harus berlatar belakang Islam atau muslim, sedangkan untuk Partai NasDem syarat kualifikasi hanya sebatas aturan formal yang tercantum dalam undang-undang pemilu tanpa ada pemisahan dari kelompok atau golongan tertentu.

3. Penyeleksi Kandidat.

Dalam penyeleksian kandidat antara Partai PPP dan NasDem menggunakan pola yang sama yaitu cenderung bersifat eksklusif dimana baik Partai PPP atau NasDem membentuk lembaga khusus yang diberikan mandat untuk melakukan proses seleksi dan keberadaan lembaga tersebut terdesentralisasi di setiap distrik pemilihan yaitu ditingkat DPP, DPW, dan

DPD. Pada Partai PPP nama lembaga penyeleksi disebut Lembaga Pemenangan Pemilu (LP2) sedangkan di Partai NasDem nama lembaganya disebut Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Kedua lembaga tersebut dalam prinsip kerjanya diamanatkan untuk bersifat netral tanpa memberikan porsi perbedaan antara kandidat dari internal partai atau eksternal partai, namun yang perlu untuk diperbaiki disini adalah masih adanya Caleg dari kedua partai yang ikut terlibat dalam struktur tim penyeleksi sehingga prinsip netralitas lembaga akan dirasa tabu selama masih adanya keterlibatan Caleg yang terlibat dalam kepanitiaan seleksi.

4. Kandidat Diseleksi.

Dalam menganalisa dimana kandidat diseleksi dapat dijelaskan bahwa Partai PPP melakukan proses seleksi kandidat menggunakan pola desentralisasi pada tiap tingkatan, hal sebut disimpulkan berdasarkan proses penyeleksian kadidat yang secara penuh dialakuakan oleh masing masing distrik pemilihan mulai dari penjajakan, pengusulan, seleksi, sampai dengan putusan. Sedangkan untuk Partai NasDem dalam melakukan proses seleksi kandiad menggunakan pola titik tengah antara seleksi terpusat (metode sentralistik) dan seleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional (metode desentralisaisi).

Kesimpulan tersebut dibuktikan dengan adanya batasan wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap tingkatan struktur partai dalam melakukan

seleksi kandidat, dimana untuk tingkat pimpinan cabang (DPC) dan DPD kewenangannya pada saat seleksi terbatas hanya pada tahapan menjaring dan merekomendasikan. Sedangkan pada tingkatan DPW kewenangannya bertambah selain menjaring dan merekomendasikan, kewenangan lain yang diberikan untuk DPW yaitu menyaring atau menyeleksi, yang selanjutnya kebijakan untuk memutuskan kandidat yang akan diusung kewenangan penuh terletak pada DPP Partai NasDem Pusat.

5. Kandidat Diputuskan.

Tentang bagaimana kandidat diputuskan antara Partai PPP dan Partai NasDem, dalam hal ini sama-sama menggunakan pola seleksi pemilihan yang berlangsung secara demokratis dengan menggunakan prosedur khusus yang dimiliki masing-masing partai. Lewat panitia seleksi LP2 dan Bappilu kedua partai berupaya menghadirkan pola seleksi setransparan mungkin sampai pada tahap pemutusan. Adapun perbedaan antara kedua partai disini terletak pada kewenangan struktural masing-masing partai dalam memutuskan kandidat, dimana pada Partai PPP pimpinan partai mulai dari DPP sampai dengan DPD, berhak untuk memutuskan kandidat mana saja yang lolos seleksi berdasarkan distrik wilayah yang menjadi kewenangannya. Sedangkan pada Partai NasDem seperti yang disebutkan pada bagian diamana kandidat diseleksi kewenangan memutuskan secara mutlak berada pada pimpinan pusat atau

DPP saja namun hal tersebut juga tetap memperhatikan pertimbangan dari struktur partai dibawahnya.

B. Saran

Dalam rekrutmen politik untuk Partai PPP disarankan untuk melakukan agenda pengkaderan yang lebih teliti agar kendala ketersediaan calon kandidat saat rekrutmen politik dapat terpenuhi sebagaimana mestinya, dalam hal ini pelunya pemetaan yang berkelanjutan untuk menjawab tantang rekrutmen politik kedepan, perlu dirumuskan sedemikian rupa agar tunas-tunas muda yang akan menjadi penerus partai dapat terfasilitasi dengan baik. Lebih lanjut jika Partai PPP konsisten terhadap kualifikasi keislaman yang harus dimiliki oleh setiap calon kandidat maka adanya training-training kepemimpinan dan tahapan pengkaderan yang terumus pada AD/ADR partai harus dilaksanakan dengan semestinya, hal ini perlu dilakukan agar orientasi dari rekrutmen politik yang dijalankan oleh PPP dapat dilihat berdasarkan hasil pekanderaya.

Sedangkan untuk untuk Partai NasDem perlu disarankan disini adalah kosistensi Partai NasDem dalam menghadirkan wajah partai sebagai partai dengan tipologi kader, karna dilihat dari hasil penelitian ini Partai NasDem dalam rekrutmen politik masih memberikan kelonggaran bagi kandidat mana saja yang akan mendaftarkan diri dalam bursa pencalonan tanpa sebelumnya melewati agenda pengkaderan. Hal itu perlu dilakukan agar ideologi dan

transformasi misi Partai NasDem yang mengusung gerakan restorasi dapat dipahami secara menyeluruh pada setiap kandidat.

Saran terakhir pada kedua partai adalah pada saat melakukan pelebagaan panitia rekrutmen politik perlu dibatasinya keterlibatan calon kadidat dalam struktur kepanitiaan, hal ini perlu dilakukan agar etika netralitas dalam melakukan rekrutmen politik dapat senantiasa terjaga.